

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Reg. 20 Kabupaten Pesawaran, Lampung

Economic Empowerment Strategy For Society In Surrounding Protection Forest Reg. 20 Pesawaran District, Lampung

Fitriani^{1*}, Cholid Fatih², Teguh Budi Trisnanto³, dan Zainal Mutaqin

¹Politeknik Negeri Lampung/Agribisnis Pangan

²Politeknik Negeri Lampung/Agribisnis

³Politeknik Negeri Lampung/Agribisnis Pangan

⁴Politeknik Negeri Lampung/Produksi Tanaman Pangan

*E-mail : fitriani@polinela.ac.id

ABSTRACT

The main problems faced in managing the Pesawaran forest area are the activities of forest encroachment, illegal logging and mining, and also shifting of boundaries that threaten the function of the forest. This research aims to ensure the design of strategies for community economic empowerment in forest areas so that they can be responsible for forest rehabilitation activities. Gayau Village, Padang Cermin sub-District, Pesawaran Region, Lampung represented as the research location that bordered with the Protection Forest 20 Region. Respondents were determined by purposive sampling method amount of 40 people. It was the representation of community leaders, village officials, farmer institutions (poktan/Gapoktan), and farmers who carry out agricultural activities around forest areas. The data collection method using a Rapid Rural Appraisal (RRA) and Focus Group Discussion (FGD) approach. The data analysis method was descriptive qualitative method using SWOT analysis. Based on the analysis results show that strategy should consider the strengthen the community forest management based on Good Agriculture Practices (GAP) farming. This is in quadrant I position or in growth conditions. It means that the appropriate strategy is combining the Strength and Opportunity condition. Then the appropriate strategy is a concentration through horizontal integration of farm diversification. The production of intercropping plants with high economic value is an important alternative. Increasing farm productivity needs through by improving the quality of cultivation with GAP principles. This strategy is included in the growth strategy by expanding community activities and developing information and communication networks in regions that have the same program. Exploration of alternative income growth from non-timber resources requires assistance from capital institutions, the extension institution (state or private) and access to technology.

Keywords: SWOT, empowerment, income, area, forest, protection

Disubmit : 18 April 2021; **Diterima:** 15 Juni 2021; **Disetujui :** 16 Agustus 2021

PENDAHULUAN

Kabupaten Pesawaran memiliki potensi lahan yang belum dioptimalkan untuk kegiatan budidaya mencapai ± 36.490,77 ha. Namun sebagian besar wilayah tersebut adalah teritori wilayah hutan lindung dan hutan industri. Pengelolaan kawasan hutan berada di bawah tanggung jawab Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KKPHL). KKPHL Kabupaten Pesawaran mengelola kawasan hutan produksi Reg. 18 Titi



Lisensi

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Bungur (1.955 ha), THR Wan Abdul Rahman Reg 19 (21.929,31 ha), hutan lindung Reg 20 (Pematang Kabuato seluas 7.954 ha), dan Reg 21. Perentian Baru (4.631,76 ha). Wilayah hutan lindung di Pesawaran hampir 80% mengalami kerusakan. Hal ini terjadi antara lain akibat perambahan hutan yang mencapai luasan 2.600 ha di area Reg. 20 Pematang Kabuato (KPHL Pesawaran 2015).

Persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan Pesawaran secara lestari adalah adanya aktivitas perambahan hutan, perambahan dan penambangan liar juga pergeseran batas terus meningkat dari waktu ke waktu (KPHL Pesawaran 2015). Hal tersebut menimbulkan kerusakan ekosistem dan menyebabkan hilangnya berbagai fungsi hutan. Fungsi utama hutan lindung adalah menjaga system penyediaan dan perlindungan terhadap siklus hidrologi dan tanah, utamanya dalam layanan jasa ketersediaan air, kekeringan dan banjir, erosi, sedimentasi hingga retensi dan kesuburan tanah. Hutan lindung berfungsi sentral dalam menjaga siklus hidrologi dan tanah. Keseimbangan layan jasa alam dan lingkungan akan mengalami gangguan dengan terjadinya destruksi wilayah hutan secara massif dan luas.

Kegiatan perambahan hutan sebagai aktivitas pemanfaatan hutan di Kawasan hutan lindung Reg. 20 telah menekan lebih dari 16% wilayah tutupan hutan terkonversi menjadi lahan garapan. Seluas ± 1.300 ha telah terdeteksi sebagai wilayah perambahan hutan oleh masyarakat dari total kawasan hutan lindung Pematang Kabuato seluas 7.954,70 ha. Teritori wilayah Kecamatan Padang Cermin yang masuk ke dalam wilayah Reg. 20 ada 8 Desa. Kerusakan wilayah hutan diperparah dengan terjadinya konversi dan alih fungsi lahan hutan untuk peruntukan lain, yaitu untuk lahan budidaya, perumahan, industri, dll. Perubahan tata guna lahan di Kawasan hutan secara terstruktur dan masih memperparah deforestasi dan degradasi lahan dalam spektum yang luas (Verbist *et al.*, 2004; Hidayat *et al.*, 2010; Wakka and Hayati, 2011; Juniyanti *et al.*, 2020).

Kondisi tersebut semakin memburuk dengan semakin terbukanya akses pengelolaan hutan. Berbagai penelitian tentang deforestasi menginformasikan tentang penyebab utama kerusakan hutan yaitu praktik konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan), *illegal logging*, perkebunan, perladangan berpindah, dan pembukaan hutan untuk transmigrasi. Rata-rata kehilangan luasan hutan di Indonesia mencapai 40 juta m³/tahun padahal laju pemanfaatan hutan secara lestari baru mencapai 22 juta m³/tahun. Hal ini antara lain disebabkan karena tidak semua pemegang konsesi hak pengelolaan hutan (HPH) melakukan upaya pengelolaan dan reforestrasi dengan seharusnya. Industri kayu yang berkembang dibayar mahal dengan kehilangan sumberdaya hutan, lingkungan, dan kerugian ekonomi yang tidak ternilai (Sunderlin 1997; Purbawiyatna *et al.* 2011). Begitupun, aktivitas perladangan berpindah dan alih fungsi lahan budidaya. Dorongan kebutuhan ekonomi menjadi motivasi utama masyarakat melakukan konservasi lahan untuk peruntukan lain, utamanya bagi perluasan lahan garapan (Hidayat 2010).

Penyelesaian persoalan konversi lahan hutan untuk aktivitas ekonomi oleh masyarakat tidak dapat serta merta dilakukan dalam jangka pendek. Relokasi perambah secara paksa menimbulkan persoalan sosial, selain juga biaya yang sangat besar, bahkan seringkali dikaitkan dengan isu HAM. Tekanan ekonomi sebagai motif utama perambah hutan harus mendapatkan jawaban integral dari setiap pemangku kebijakan. Tanpa ada upaya substitusi sumber-sumber pendapatan bagi perambah, maka mereka akan kembali lagi untuk melakukan konversi hutan menjadi lahan garapan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat perambah hutan menjadi motivasi utama pendorong mereka melakukan aktivitas membuka lahan garapan (konversi) di hutan sebagai sumber pendapatannya

Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari berkembang dengan pelibatan partisipasi masyarakat pemanfaat hasil hutan. Semangat partisipatif didorong untuk memberikan ruang pemanfaatan hutan dan hasil hutan bagi masyarakat yang secara illegal masuk dalam koridor pembinaan menjaga fungsi hutan. Berdasarkan Permenhut 47/2013 pemanfaatan hutan wilayah tertentu dapat dilakukan oleh masyarakat utamanya yang secara kolektif bergabung dalam wadah organisasi ekonomi dan pertanian di wilayah pembinaan tersebut. Lembaga masyarakat dapat berupa kelompok tani, Gabungan kelompok tani (Gapoktan, koperasi, UMKM, atau badan usaha BUMN/D/S. Peraturan ini merupakan landasan yuridis agar

pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan tetap mengikutsertakan masyarakat pemanfaat hutan secara aktif untuk menjaga fungsi hutan lestari.

Peningkatan kualitas dan kuantitas diversifikasi produk hasil hutan non-kayu, perbaikan harga hasil hutan non-kayu, pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dapat menjadi strategi pengelolaan hutan yang memberdayakan masyarakat yang bergantung pada hasil hutan sebagai sumber pendapatannya. Namun kepastian dan ketegasan aturan hukum, pembinaan, kontrol terhadap praktik baik budidaya dalam wilayah hutan, hingga aktivitas pemanfaatan hasil hutan non kayu diperlukan (Zulaifah 2006). Agroforestri merupakan salah satu praktik baik pengelolaan sumberdaya lahan hutan secara lestari. Kombinasi tanaman budidaya dengan penanaman tegakan pohon penting dalam pola agroforestri memberikan biodiversitas lebih baik dan menjaga fungsi penyediaan jasa lingkungan. Hal ini terjadi pada usahatani kopi dengan agroforestri yang mampu memberikan performa keberagaman biodiversitas dan perbaikan pendapatan petani dibandingkan dengan usahatani monokultur (Fitriani et al., 2018b; 2018a; 2018).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat pengguna hasil hutan menjadi penentu tingkat partisipasi aktif penerapan praktik baik agroforestri dalam pilihan budidaya tanaman komersial di wilayah sekitar hutan. Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan hutan perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat berdasarkan potensi sumberdaya hutan yang ada. Hal ini berarti, upaya pemanfaatan sumberdaya hutan tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan hutan namun juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengembangan sumber pendapatan bagi masyarakat pemanfaat hutan di sekitar kawasan hutan lindung.

METODE PENELITIAN

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran memiliki 8 desa, dan empat desa berada di sekitar kawasan hutan Reg 20, yaitu Desa Gayau, Banjaran, Durian dan Bunut Seberang dengan jumlah 2615 KK dengan luas teritori 791,3 km². Metode penentuan lokasi dilakukan secara *purposive*, menetapkan Desa Gayau, desa yang berbatasan langsung dengan Reg 20 dan menjadi binaan KPLH Kab. Pesawaran sebagai lokasi penelitian. Responden sebanyak 40 orang ditentukan secara *purposive sampling* memperhatikan representasi dari tokoh masyarakat, perangkat desa, kelembagaan petani (poktan/Gapoktan), dan petani yang melakukan aktivitas pertanian di sekitar kawasan hutan. Penelitian dilakukan ini menggunakan metode survei. Eksplorasi penggalian data dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh kunci dari tingkat petani, kelompok tani/Gapoktan, aparat desa/kecamatan, BP-DAS, dan dinas terkait dalam *Focus Group Discussion* (FGD). Data primer terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan melalui telaah dan penggalian masalah dan pemecahannya. Metode deskriptif kualitatif menggunakan alat analisis pengambilan keputusan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) analisis. Sebagai metode analisis kualitatif, SWOT menghasilkan rumusan strategi melalui pertimbangan berbagai factor internal dan eksternal yang dihadapi organisasi (Napitupulu, et al., 2013; Agustina et al., 2015; Mahfud and Mulyani, 2017). Identifikasi kondisi internal dilakukan melalui pemetaan kondisi organisasi dari sisi kekuatan dan kelemahan. Sementara itu, kondisi eksternal ditelusur peluang dan ancaman. SWOT analisis dilakukan melalui tahapan 1) penentuan kondisi internal dalam Matrik Internal Faktor (IFEM: *The Internal Factor Evaluation Matrix*), (sebagai berikut (David et al., 2009; David, 2016; Mahfud and Mulyani, 2017). 2) Penentuan Matrik Eksternal Faktor (EFEM: *The External Factor Evaluation Matrix*). 3) Penyusunan Matrik SWOT, dan 4) Perumusan alternatif strategi yang merupakan kombinasi silang strategi berdasarkan kondisi matrik IFEM dan EFEM dalam (SO, ST, WO, WT).

Deskripsi kondisi peluang dan ancaman eksternal diidentifikasi dan dipetakan berdasarkan situasi yang dihadapi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan risiko kelemahan organisasi. Matrik SWOT selanjutnya disajikan dalam keterkaitan empat rangkaian peluang strategi. Strategi kombinasi kekuatan dan peluang (S-O), strategi padanan kekuatan untuk menghadapi tantangan (S-T), strategi meminimalkan kelemahan dengan pemanfaatan peluang (W-O), dan strategi mengatasi kelemahan dengan

meminimalkan ancaman (W-T). Selanjutnya kombinasi strategi tersebut disandingkan dalam kerangka bagan Matrik SWOT (Baudino et al. 2017) pada Tabel 1:

Tabel 1. Kerangka analisis SWOT

	Internal	Strengths (S) Tentukan 5 – 10 faktor yang menjadi kekuatan	Weakness (W) Tentukan 5 – 10 faktor yang menjadi kelemahan
Eksternal			
	Opportunities (O) Tentukan 5 – 10 faktor yang menjadi peluang	Strategi (SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
	Threats (T) Tentukan 5 – 10 faktor yang menjadi ancaman	Strategi (ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi (WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pengembangan sumberdaya ekonomi

Inventarisasi kondisi internal pengelolaan kawasan hutan rakyat dilakukan terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan stakeholders dalam aktivitas pengelolaan kawasan sekitar hutan Reg 20. *Stakeholders* yang menjadi narasumber adalah:

1. Kepala Seksi Perencanaan KPHL Pesawaran
2. Kepala TU KPHL Pesawaran
3. Kepala Seksi Kelembagaan BP DAS WSS
4. Kepala Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin

Informasi kondisi kekuatan (*Strength*) yang diinventarisasi melalui pernyataan sebagai berikut:

1. (S1): Kondisi ketersediaan lahan kawasan hutan Reg 20. Pesawaran (luasan, kondisi tanah, aman dari kemungkinan terpapar hal berbahaya atau bencana, dan mendukung situasi peningkatan produktivitas sumberdaya hutan non-kayu).
2. (S2): Diversitas pohon tegakan yang dimiliki masyarakat sangat potensial dalam mendukung diversifikasi hasil hutan non-kayu.
3. (S3): Kemudahan akses dan ketersediaan fasilitas umum untuk tumbuhkembangnya diversifikasi usaha hasil hutan tersedia secara memadai
4. (S4): Petani berada pada rentang usia produktif memiliki potensi untuk adaptif dan responsif untuk menerapkan prinsip usahatani berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga memiliki sumber pendapatan utama dan alternatif sumber pendapatan lainnya.
5. (S5): Usaha hilirisasi hasil hutan non-kayu melau berkembang.

Kondisi kelemahan sebagai berikut:

1. (W1): Diversifikasi usaha hasil hutan non-kayu belum secara optimal dikembangkan.
2. (W2): Kualitas pendidikan masyarakat wilayah sekitar hutan secara rerata rendah.
3. (W3): Ekspansi eksplorasi lahan hutan oleh masyarakat sulit dikontrol.
4. (W4): Diversifikasi tanaman tumpang sari hasil hutan non-kayu belum optimal dalam meningkatkan pendapatan
5. (W5): Aktivitas ekonomi dan usahatani belum secara optimal berorientasi pada pelaksanaan praktik baik penerapan prinsip kelestarian fungsi hutan.

Kondisi eksternal masyarakat meliputi potensi dan situasi di luar masyarakat yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pengelolaan hutan. Hasil kristalisasi kondisi eksternal disusun sebagai berikut:

1. Adanya Permenhut No. 47 tahun 2013 yang memberikan kesempatan pihak ketiga (masyarakat

- mengelola hutan rakyat yang dikuatkan dengan peraturan yang berlaku (O1).
2. Perubahan paradigma pengelolaan hutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip budidaya pertanian yang baik (*Good Agriculture Practices*)
 3. Peluang terbukanya usaha non kayu yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. (O3).
 4. Sikap terbuka dan transparansi dari Dinas KPHL dan Dinas Kehutanan tentang program-program pembinaan kepada masyarakat desa sekitar hutan (O4).
 5. KPHL dan Dinas Kehutanan memberikan sikap positif dan merangkul (*empower*) masyarakat di wilayah sekitar hutan sehingga membuka ruang keterikatan (*bonding*) dalam ranah kepercayaan dan tanggung jawab untuk penerapan program-program partisipatif hutan lestari (O5).

Sementara itu, kondisi ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat antara lain:

1. Keberpihakan anggaran dan program dari Pemda Kabupaten Pesawaran, Kantor KPHL, dan Dinas Kehutanan tidak pasti (T1).
2. Kualitas dan kuantitas SDM pendamping KPHL Pesawaran perlu terus ditingkatkan dalam kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program pembinaan masyarakat sekitar hutan (T2).
3. Prinsip budidaya pertanian yang baik (*Good Agriculture Practices*) di hutan Reg. 20 belum secara luas dipromosikan, tidak ada demonstrasi plot, sehingga masih kurang sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat sekitar kawasan Hutan Reg.20 (T3).
4. Kegiatan pembinaan hilirisasi hasil olahan hutan non-kayu dan akses permodalan usaha baru belum ada, sehingga usaha baru belum berkembang (T4).
5. Peluang dan izin usaha di wilayah sekitar hutan secara teknis belum dikelola dengan baik (T5)

Berdasarkan rekapitulasi data yang dilakukan selanjutnya disusun penentuan peringkat kondisi internal masyarakat pengguna hutan. Posisi kekuatan dan kelemahan sebagai faktor internal disajikan pada Tabel 2. Sementara itu, kondisi dan situasi lingkungan eksternal pemerangkatannya ditabulasi di Tabel 3.

Tabel 2. Matrik Faktor Internal (IFEM)

No Resp		Bobot	Rating	Skor	Peringkat
Kekuatan					
1	S4	0.10	4.5	0.47	1
2	S5	0.10	4.5	0.47	2
3	S1	0.09	4.25	0.42	3
4	S2	0.09	4.25	0.42	4
5	S3	0.09	4.25	0.42	5
Jumlah				2.22	
Kelemahan					
1	W1	0.10	4.5	0.47	1
2	W2	0.09	4.25	0.42	2
3	W5	0.09	4.25	0.42	3
4	W3	0.09	4	0.37	4
5	W4	0.09	4	0.37	5
Jumlah				2.06	

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa peringkat kondisi yang menjadi kekuatan dalam pengelolaan kawasan hutan menjadi sebagai berikut:

1. (S4): Petani berada pada rentang usia produktif memiliki potensi untuk adaptif dan responsif untuk menerapkan prinsip usahatani berkelanjutan. Selain itu, masyarakat juga memiliki sumber pendapatan utama dan alternatif sumber pendapatan lainnya.
2. (S5): Usaha hilirisasi hasil hutan non-kayu melau berkembang.
3. (S1): Kondisi ketersediaan lahan kawasan hutan Reg 20. Pesawaran (luas, kondisi tanah, aman dari kemungkinan terpapar hal berbahaya atau bencana, dan mendukung situasi peningkatan produktivitas sumberdaya hutan non-kayu).
4. (S2): Diversitas pohon tegakan yang dimiliki masyarakat sangat potensial dalam mendukung diversifikasi hasil hutan non-kayu.
5. (S3): Kemudahan akses dan ketersediaan fasilitas umum untuk tumbuhkembangnya diversifikasi usaha hasil hutan tersedia secara memadai

Dengan demikian yang menjadi ranking pertama pada kondisi internal kekuatan adalah sumber pendapatan utama dari pertanian dan berada pada usia produktif. Sementara potensi usaha diversifikasi usahatani untuk hilirisasi olahan hasil hutan non-kayu menjadi kekuatan kedua.

Peringkat urutan kepentingan kondisi kelemahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan sebagai berikut:

1. (W1): Diversifikasi usaha hasil hutan non-kayu belum secara optimal dikembangkan.
2. (W2): Kualitas pendidikan masyarakat wilayah sekitar hutan secara rerata rendah.
3. (W3): Ekspansi eksplorasi lahan hutan oleh masyarakat sulit dikontrol.
4. (W5): Aktivitas ekonomi dan usahatani belum secara optimal berorientasi pada pelaksanaan praktik baik penerapan prinsip kelestarian fungsi hutan.
5. (W4): Diversifikasi tanaman tumpang sari hasil hutan non-kayu belum optimal dalam meningkatkan pendapatan

Dengan demikian, kelemahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adalah lemahnya penerapan diversifikasi usaha hasil hutan non-kayu secara optimal dan kualitas Pendidikan yang tidak menunjang tumbuhkembangnya diversifikasi usaha hasil hutan non-kayu.

Pada penilaian kondisi lingkungan eksternal, scoring dilakukan pada situasi peluang dan tantangan. Peringkat kondisi faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matrik Faktor Eksternal (EFEM)

No Resp		Bobot	Rating	Skor	Peringkat
Peluang					
1	O5	0.10	4.5	0.47	1
2	O3	0.10	4.25	0.44	2
3	O4	0.09	4.5	0.44	3
4	O2	0.09	4.25	0.42	4
5	O1	0.08	4.25	0.37	5
Jumlah				2.16	
Ancaman					
1	T1	0.10	4.5	0.47	1
2	T2	0.09	4.25	0.42	2
3	T3	0.09	4	0.39	3
4	T5	0.08	4.25	0.37	4
5	T4	0.08	4	0.35	5
Jumlah				2.01	

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa peringkat kondisi yang menjadi kekuatan dalam pengelolaan kawasan hutan menjadi sebagai berikut:

1. KPHL dan Dinas Kehutanan memberikan sikap positif dan merangkul (*empower*) masyarakat di wilayah sekitar hutan sehingga membuka ruang keterikatan (*bonding*) dalam ranah kepercayaan dan tanggung jawab untuk penerapan program-program partisipatif hutan lestari (O5).
2. Peluang terbukanya usaha non kayu yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. (O3).
3. Sikap terbuka dan transparansi dari Dinas KPHL dan Dinas Kehutanan tentang program-program pembinaan kepada masyarakat desa sekitar hutan (O4).
4. Perubahan paradigma pengelolaan hutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui penerapan prinsip budidaya pertanian yang baik (*Good Agriculture Practices*) (O2)
5. Adanya Permenhut No. 47 tahun 2013 yang memberikan kesempatan pihak ketiga (masyarakat mengelola hutan rakyat yang dikuatkan dengan peraturan yang berlaku (O1).

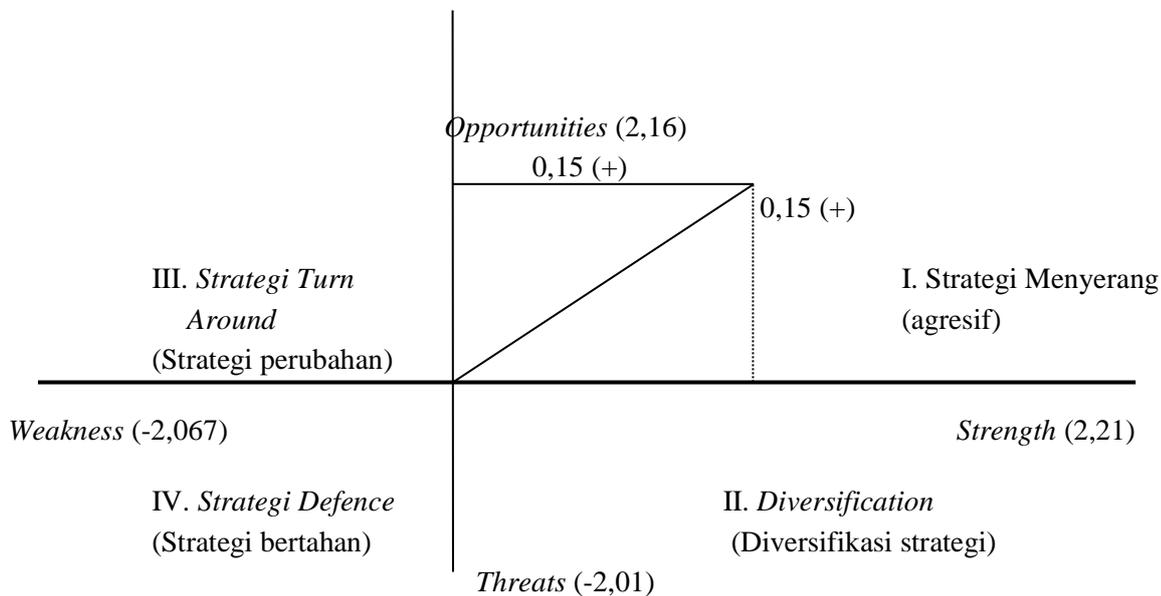
Ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat urutan peringkatnya adalah:

1. Keberpihakan anggaran dan program dari Pemda Kabupaten Pesawaran, Kantor KPHL, dan Dinas Kehutanan tidak pasti (T1).
2. Kualitas dan kuantitas SDM pendamping KPHL Pesawaran perlu terus ditingkatkan dalam kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian program pembinaan masyarakat sekitar hutan (T2).
3. Prinsip budidaya pertanian yang baik (*Good Agriculture Practices*) di hutan Reg. 20 belum secara luas dipromosikan, tidak ada demonstrasi plot, sehingga masih kurang sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat sekitar kawasan Hutan Reg.20 (T3).
4. Peluang dan izin usaha di wilayah sekitar hutan secara teknis belum dikelola dengan baik (T5).
5. Kegiatan pembinaan hilirisasi hasil olahan hutan non-kayu dan akses permodalan usaha baru belum ada, sehingga usaha baru belum berkembang (T4).

Berdasarkan analisis EFAS di atas, peluang (*Opportunities*) mendapatkan skor 2,16 dan ancaman (*Threats*) mendapatkan skor 2,01. Jadi total skor EFAS sebesar 4,17. Sementara itu IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) kekuatan (*Strength*) sebesar 2,21, kelemahan (*weakness*) sebesar 2,067. Selisih dapat diketahui melalui perhitungan berikut:

$$\begin{aligned} \text{Strengths} - \text{Weakness} &= 2,22 - 2,06 \\ &= 0,16 \\ \text{Opportunities} - \text{Threats} &= 2,16 - 2,01 \\ &= 0,15 \end{aligned}$$

Maka kekuatan lebih tinggi dari kelemahan dengan selisih (+) 0,15. Sementara itu nilai peluang juga lebih tinggi dari nilai ancaman dengan selisih (+) 0,15. Selanjutnya perhitungan nilai tersebut dapat digambarkan pada Diagram *Cartesius* pada Gambar 1.



Gambar 1. Penempatan SWOT analisis pada kuadran diagram Cartesius

Berdasarkan hasil penjumlahan nilai keseluruhan skor faktor juga dapat ditampilkan dalam tabulasi rumusan strategi hasil elaborasi kristalisasi pemerinkatan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi masyarakat/organisasi. Tabel 4 menguraikan hasil penilaian skor masing-masing komponen dalam SWOT.

Tabel 4. Penilaian skoring penilaian komponen SWOT analisis

IFEM \ EFEM	Kekuatan <i>Strength (S)</i>	Kelemahan <i>Weaknesses (W)</i>
Peluang <i>Opportunities(O)</i>	S-O strategy = 2,22 + 2,16 = 4,38	W-O strategy = 2,07 + 2,16 = 4,23
Tantangan <i>Threats (T)</i>	S-T strategy = 2,22 + 2,01 = 4,23	W-T strategy = 2,07 + 2,01 = 4,28

Berdasarkan Tabel 4 dapat disusun kuadran strategi yang dapat dipilih. Jumlah nilai IFEM = 4,28 dan nilai EFEM = 4,17; maka penempatan strategi pengelolaan hutan berada pada kuadran 1. Pengelolaan hutan masyarakat untuk diversifikasi usahatani berlandaskan penerapan GAP menjadi strategi pertumbuhan (*growth strategy*), karena berada pada posisi kuadran I. Strategi konsentrasi yang sesuai pada posisi ini adalah integrasi horizontal melalui pengayaan diversifikasi usahatani. *Growth strategy* dengan upaya diversifikasi usaha menjadi program utama yang penting bagi upaya membangun partisipasi kelestarian hutan yang tetap menyejahterakan masyarakat. Perluasan kegiatan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi horizontal usahatani dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu disertai dengan penguatan jejaring informasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan pada daerah yang memiliki program yang sama untuk pengembangan kawasan hutan kemasyarakatan (agroforestri) diperlukan. Strategi ini termasuk dalam strategi pertumbuhan. Pada Tabel 5 disajikan rincian kombinasi strategi yang menjadi rekomendasi kebijakan program pengelolaan dan pembinaan partisipatif masyarakat hutan untuk hutan lestari.

Tabel 7. Rekomendasi kebijakan program pengelolaan dan pembinaan partisipatif masyarakat hutan untuk hutan lestari

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>S(Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia produktif memiliki potensi untuk adaptif dan responsif pada usahatani berkelanjutan. 2. Potensi hilirisasi hasil hutan non-kayu. 3. Lahan kawasan hutan lindung Reg 20. Pesawaran yang luas produktif untuk hasil hutan non-kayu. 4. Diversitas pohon tegakan masyarakat mendukung diversifikasi hasil hutan non-kayu. 5. Kemudahan akses dan ketersediaan fasilitas umum 	<p>W (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diversifikasi hasil hutan non-kayu belum optimal dikembangkan 2. Kualitas pendidikan masyarakat wilayah sekitar hutan secara rerata rendah. 3. Ekspansi eksplorasi lahan hutan oleh masyarakat sulit dikontrol. 4. Aktivitas ekonomi dan usahatani belum secara optimal pada praktik baik kelestarian fungsi hutan. 5. Diversifikasi tanaman tumpang sari hasil hutan non-kayu belum optimal dalam meningkatkan pendapatan
<p>Opportunities(O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPHL dan Dinas Kehutanan memberikan sikap positif dan merangkul (<i>empower</i>) masyarakat 2. Peluang terbukanya usaha non kayu 3. Sikap terbuka dan transparansi dari Dinas KPHL dan Dinas Kehutanan 4. Perubahan paradigma hutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat 5. Adanya Permenhut No. 47/2013 untuk pengelolaan hutan rakyat. 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan secara terstruktur dan berkelanjutan dari KPHL dan Dinas Kehutanan terkait penerapan praktik GAP. 2. Eksplorasi alternative usaha non kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat hutan. 3. Pendampingan dari lembaga permodalan 4. Mobilisasi sumberdaya masyarakat hutan melalui kelembagaan masyarakat. 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi peningkatan produktivitas hasil dan sumber pendapatan melalui diversifikasi dan hilirisasi hasil hutan non-kayu 2. Penguatan modal sosial kelembagaan masyarakat untuk soliditas dan kerjasama pengelolaan usaha yang mendukung hutan lestari 3. Promosi, edukasi, dan pelibatan aktif masyarakat dalam semua aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah hutan secara lestari
<p>Threats(T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberpihakan anggaran dan program tidak pasti. 2. Kualitas dan kuantitas SDM pendamping KPHL Pesawaran perlu terus ditingkatkan. 3. Prinsip budidaya pertanian yang baik luas dipromosikan belum ada dan tidak ada demonstrasi plot. 4. Peluang dan izin usaha hutan belum dikelola dengan baik (T5). 5. Hilirisasi hasil olahan hutan non-kayu dan akses permodalan usaha baru belum ada pembinaan. 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobilisasi sumberdaya ekonomi masyarakat (swadaya) dalam aktivitas pemeliharaan fungsi hutan. 2. Partisipasi aktif dari masyarakat hutan menjadi kunci keberhasilan program kelestarian hutan 3. Pembinaan dan pendampingan oleh KPHL dan Dinas Kehutanan, Dinas PMD hingga Lembaga pemerhati lingkungan diperlukan 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan 2. Program pembinaan secara terstruktur dan fokus pada komunitas masyarakat hutan 3. Penguatan koordinasi dan jejaring kerjasama ABG-MS yang berprinsip pada kelestarian perlu terus diinisiasi

KESIMPULAN

Rumusan strategi pengembangan dan pengelolaan sumberdaya hutan terkait erat dengan pengayaan sumber penerimaan masyarakat dari hasil hutan non-kayu. Masyarakat pada kawasan hutan lindung perlu fokus pada usaha diversifikasi horizontal usahatani berlandaskan *Good Agriculture Practices* (GAP). Strategi diversifikasi merupakan bagian dari strategi pertumbuhan (*growth*) berada pada kuadran I. Strategi pertumbuhan adalah strategi kombinasi faktor S-O (*strenght-opportunity*). S-O fokus menggunakan secara optimal kekuatan dan peluang untuk konsentrasi pada integrasi horizontal diversifikasi usahatani. Pengusahaan produksi tanaman tumpangsari yang bernilai ekonomi tinggi menjadi alternatif penting. Peningkatan produktivitas usahatani perlu dilakukan melalui perbaikan kualitas budidaya berprinsip GAP. Eksplorasi tumbuhnya sumber-sumber pendapatan alternatif dari aktivitas usahatani maupun ekonomi produktif (bioindustri desa, perdagangan, dan ekowisata) memerlukan kehadiran pendampingan lintas sektoral baik oleh dinas/instansi pemerintah (daerah/Pusat) pun Lembaga/organisasi swadaya masyarakat (nasional/global) untuk mengatasi kendala permodalan, penguasaan Ipteks, pasar, dan kelembagaan. Mobilisasi sumberdaya ekonomi masyarakat (swadaya) dalam aktivitas pemeliharaan fungsi hutan focus pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan secara lestari sebagai bagian integral dalam kelangsungan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan. Penguatan modal sosial petani melalui pembentukan kelembagaan masyarakat hutan diperlukan. Kelembagaan sosial menjadi kunci partisipasi aktif dari masyarakat hutan dalam mewujudkan kelestarian hutan. Keberadaan penyuluh kehutanan secara kuantitas dan kualitas perlu ditingkatkan untuk menjamin aktivitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat kawasan hutan menjalankan praktik-praktik GAP dan kelestarian hutan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada KPHL Reg 20. Kabupaten Pesawaran, Kepala Desa Gayau, segenap tim teknis penyuluh kehutanan Kab. Pesawaran dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan survei lapang. Penyelenggaraan kegiatan riset ini berlangsung menggunakan sumber peneltian dari Politeknik Negeri Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Titin, Sugeng Raharto, and Merry Tri H.S. 2015. "Prospek Pengembangan Komoditas Kopi Robusta Di PT. Kaliputih Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 8 (2): 11–24. <https://www.neliti.com/publications/22648/prospek-pengembangan-komoditas-kopi-robusta-di-pt-kaliputih-kecamatan-ledokombo>.
- Baudino, Claudio, Nicole Roberta Giuggioli, Rossella Briano, Stefano Massaglia, and Cristiana Peano. 2017. "Integrated Methodologies (SWOT, TOWS, LCA) for Improving Production Chains and Environmental Sustainability of Kiwifruit and Baby Kiwi in Italy." *Sustainability (Switzerland)* 9 (9): 1–18. <https://doi.org/10.3390/su9091621>.
- BPS Pesawaran. 2020. "Kabupaten Pesawaran Dalam Angka." Gedong Tataan.
- David, Meredith E, Forest R David, and Fred R David. 2009. "The Quantitative Strategic Planning Matrix (Qspm) Applied To a Retail Computer Store." *The Coastal Business Journal* 8 (1): 42–52.
- David, R Fred. 2016. *Managemen Strategik*. Prentice Hall. Florence, South Carolina: Francis Marion University.
- Fitriani, Bustanul Arifin, Wan Abbas Zakaria, Hanung Ismono, and Rudi Hilmanto. 2018. "Coffee Agroforestry Performance in Pulau Pangung Sub-District , Tanggamus , Lampung , Indonesia." *Pelita Perkebunan* 34 (2): 69–79.

- Fitriani, Bustanul Arifin, Wan Abbas Zakaria, and R. Hanung Ismono. 2018a. "Coffee Agroforestry for Sustainability of Upper Sekampung Watershed Management." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 141 (1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/141/1/012006>.
- Fitriani, Bustanul Arifin, Wan Abbas Zakaria, and R Hanung Ismono. 2018b. "Kinerja Usahatani Kopi Di Hulu DAS Sekampung , Tanggamus , Lampung Performance of Coffee Agroforestry in Hulu DAS Sekampung ,." *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* 18 (3): 165–74.
- Hidayat, Mukhtar; Soemarno Kliwon. 2010. "Pengelolaan Program HKm Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat." *WACANA* 13 (1): 132–51.
- Hidayat, Taufik, Nurmala K Pandjaitan, Arya H Dharmawan, and Felix Sitorus. 2010. "Kontestasi Sains Dengan Pengetahuan Lokal Petani Dalam Pengelolaan Lahan Rawa Pasang Surut." *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia* 04 (01): 1–16.
- Juniyanti, Lila, Lilik Budi Prasetyo, Dwi Putra Aprianto, Herry Purnomo, and Hariadi Kartodihardjo. 2020. "Perubahan Penggunaan Dan Tutupan Lahan, Serta Faktor Penyebabnya Di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau (Periode 1990-2019)." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)* 10 (3): 419–35. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.3.419-435>.
- KPHL Pesawaran. 2015. "Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Pesawaran 2015-2024." Gedong Tataan.
- Mahfud, Tuatul, and Yogiana Mulyani. 2017. "Aplikasi Metode QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)." *Jurnal Sosisal Humanioradan Pendidikan* 1 (1): 66–76.
- Napitupulu, Dinda Febrima, Chay Asdak, and Budiono. 2013. "Mekanisme Imbal Jasa Lingkungan Di Sub-DAS Cikapundung (Studi Kasus Pada Desa Cikole Dan Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat)." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 11 (2): 73–83.
- Purbawiyatna, Alan, Hariadi Kartodihardjo, Hadi S Alikodra, Lilik Budi Prasetyo, Kampus Ipb, and Dramaga Bogor. 2011. "DI KAWASAN BERFUNGSI LINDUNG (Analysis of Sustainability of Private Forest Management in Protection Area) Sekolah Pascasarjana , Institut Pertanian Bogor , Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Departemen Manajemen Kehutanan , Fakultas Kehutanan Institut Perta." *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, no. 1: 84–92.
- Sunderlin, William D. 1997. "Shifting Cultivation and Deforestation in Indonesia : Steps Toward Overcoming Confusion in the Debate."
- Verbist, Bruno; Pasya, Gamal. 2004. "Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan , Konflik Dan Negosiasi Di Sumberjaya, Lampung Barat - Propinsi Lampung." *Agrivita* 26 (1): 20–28.
- Wakka, Abdul Kadir, and Nur Hayati. 2011. "Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Agroforestry Pada Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Borisallo." *JURNAL Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 8 (3): 231–49.
- Zulaifah, Siti. 2006. "Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan HUtan Regolah Di Kabupaten Pati Jawa Tengah." *Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota*. Universitas Diponegoro.